ISLAM DAN PERGESERAN POLITIK DI INDONESIA:

WACANA INTELEKTUAL ISLAM DALAM MERESPONS ISU

DEMOKRATISASI, 1970 – 2000

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS ADAB
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUMANIORA (S. HUM).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Disusun Oleh:

HARTANTO
NIM. 01120575

SEJARAH DAN PERADABAN ISLAM
FAKULTAS ADAB
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004

Dra. Himayatul Ittihadiyah, M. Hum
Dosen Fakultas Adab
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS
Hal : Skripsi Saudara Hartanto
Lamp : -

Kepada
Dekan Fakultas Adab
UIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'laikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hartanto
NIM / Fak : 01120575 / Adab
Judul : Islam dan Pergeseran Politik di Indonesia: Wacana Intelektual Islam dalam Merespons Isu Demokratisasi, 1970 - 2000

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Adab. Selanjutnya skripsi saudara tersebut hendaknya dapat segera dimunaqosahkan.

Semoga skripsi ini bermanfaat, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 Dzul- Qa'dah 1425 H
27 Januari 2005

Pembimbing

Dra. Himayatul Ittihadiyah, M. Hum

NIP. 150270220

DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./Fax. (0274) 513949

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

ISLAM DAN PERGESERAN POLITIK INDONESIA : WACANA INTELEKTUAL ISLAM DALAM MERESPONS ISU DEMOKRATISASI (1970 – 2000)

Diajukan oleh :

1. N a m a	: **HARTANTO**
2. N I M	: 01120575
3. Program	: Sarjana Strata 1
4. Jurusan	: Sejarah Peradaban Islam

Telah dimunaqasyahkan pada hari: **Rabu** tanggal **2 Februari 2005** dengan nilai **B** dan telah dinyatakan syah sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Humaniora (S.Hum.)**

Panitia Ujian Munaqosyah

Ketua Sidang

Drs. H. Maman Abdul Malik Sya'roni, M.S.
NIP. 150197351

Sekretaris Sidang

Syamsul Arifin, S.Ag.
NIP. 150312445

Pembimbing /merangkap penguji,

Dra. Himmayatul Ittihadiyah, M.Hum.
NIP. 150267220

Penguji I

Drs. H. Mundzirin Yusuf, M.SI.
NIP. 150177004

Penguji II

Drs. Musa, M.Si.
NIP. 150254036

Yogyakarta, 1 Maret 2005
Dekan,

Drs. H. M. Syakir Ali, M.Si.
NIP. 150178235

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Roda kehidupan selalu berputar,

karenanya kita harus bekerja keras untuk lebih maju."

*By. Suyoto**

"Orang yang berhasil dalam pendidikan akan lebih sempurna,

bila saja di imbangi dengan kebijaksanaan dalam bersikap dan tutur kata."

*By. Setiawan***

"Masa lalu adalah tanggung jawab,

Saat ini harus lebih baik,

Yang akan datang adalah tantangan."

*By. Rosyeed****

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

* Suyoto adalah ayah penulis. Nasihat ini diberikan setiap kali penulis hendak kembali ke Yogyakarta.

** Setiawan adalah Paman penulis.

*** Rosyeed adalah teman baik penulis. Kata-kata ini terlontar saat kami menikmati indahnya matahari yang terbenam di bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Saat kami sama-sama mencoba merumuskan sebuah makna dari kehidupan.

Persembahan

"kupersembahkan karya ini buat semua pengagum cinta,

yang selalu menebarkan kasih sayang terhadap sesama,

yang menciptakan kedamaian,

yang memberikan perlindungan,

yang selalu menyatukan tangan,

untuk mendapatkan apa yang tidak dapat dicapai sendirian."

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kata Pengantar

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امورالدنيا والدين. والصلات والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين .

Dengan Nama Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Penyayang. Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan petunjuk, bimbingan serta kekuatan lahir dan batin kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw., keluarga dan para sahabatnya serta seluruh pengikutnya yang setia.

Tulisan ini tentunya tidak akan selesai tanpa adanya dukungan dan bimbingan dari banyak pihak. Oleh karenanya penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terkira kepada:

1. Dekan Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ketua Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dra. Himayatul Ittihadiyah, M. Hum selaku pembimbing yang tak pernah bosan memberikan arahan dan masukan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Para Dosen di Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah berbagi ilmu dengan penulis selama mengikuti studi dan segenap staf TU yang baik hati membantu kelancaran studi di Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Kepada pengelola perpustakaan pusat UIN Sunan Kalijaga dan Perpustakaan fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan keleluasaan kepada penulis dalam menggunakan fasilitas perpustakaan.
6. Buat teman-teman SPI- A dan teman-teman angkatan 2001.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

7. Kepada Abid, Mas Bahrul, Zulfa, T. Purwanto, Idoh, Ningrum, Tantowi, Rosyeed, Aziz, Anjar, Aep, Bang Nafi, Laely Wijaya, Ade Shihabuddin, Sufa'at, Irma, Rahma, Opik, Angger, Titin, Habib, Cecep, Yasin, Kak Mamang, dan Idris (terima kasih atas bantuannya). Buat Nuning, Tiwi, Purwati, Siswanto, May One, Ria, Tommy Kecil, dan Ira. (terimakasih atas dukungannya).
8. Buat ayahanda tercinta Suyoto, ibunda tersayang Widatin (terima kasih atas do'a restunya). Paman dan bibi tercinta (Om Setiawan, Om Khotib, bule' Qomariyah, bule' Yani, bule'Lasmi, bule' Asiyati sekeluarga, bule' Aminah sekeluarga, dan bule' Khadijah sekeluarga), mbah Kakung dan mbah Putri.
9. Buat saudara-saudaraku tersayang (Tri wahyuni, Slamet Riyadi, Miftahul Hadi, Alfina Damayanti, Liswiyadi, Sri Yunani, Yuyun, Puguh Winanto, Siti Maisaroh, Ajai, dan Amar).

Akhirnya, penulis hanya bisa memanjatkan doa semoga amal baik yang telah dilakukan mendapat balasan yang setimpal dari-Nya. Amin.

Yogyakarta, 17 Dzul- Qa'dah 1425 H
27 Januari 2005
Penulis

HARTANTO

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

Nota Dinas..... ii

Halaman Pengesahan..... iii

Motto..... iv

Persembahan..... v

Kata Pengantar..... vi

Daftar Isi..... viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Batasan dan Rumusan Masalah..... 12

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 13

D. Tinjauan Pustaka..... 14

E. Landasan Teori..... 15

F. Metode Penelitian..... 18

G. Sistematika Pembahasan..... 21

BAB II ISLAM DAN PERKEMBANGAN POLITIK DI INDONESIA SEBELUM TAHUN 1970

A. Zaman Mitos..... 23

B. Zaman Ideologi..... 27

C. Posisi Umat Islam dalam Kancah Perpolitikan Nasional..... 30

BAB III MEMAHAMI PERGESERAN POLITIK DI INDONESIA DAN SEKILAS PEMAHAMAN TENTANG DEMOKRASI

A. Memahami Pergeseran Politik di Indonesia: Sebuah kajian linguistik..... 34

1. Pergantian Daftar Kosakata..... 37

2. Pergeseran Makna Kata..... 40

B. Semarak Parpol Islam..... 41

C. Strategi Baru Politik Islam..... 51

1. Deideologisasi..... 53

2. Strategi Baru..... 55

D. Islam dan Demokrasi..... 57

1. Nilai dan Kriteria Proses Demokrasi..... 57

2. Demokrasi Dalam Tinjauan Sejarah Islam..... 61

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

3. Prinsip-prinsip Demokrasi: Suatu Pandangan Islam... 70

BAB IV MERAJUT AGENDA DEMOKRASI: TANTANGAN DAN HARAPAN

A. Partai Politik dan Demokrasi di Indonesia: Suatu Tinjauan Sejarah..... 77

B. Agama dan Demokrasi di Indonesia..... 84

1. Umat dan Jamaah Sebagai Kekuatan Sosial..... 86

2. Gerakan Kesadaran, Perubahan Dari Dalam..... 88

3. Demokratisasi..... 89

C. Kendala Demokratisasi di Indonesia..... 92

1. Kendala Struktural Demokrasi..... 93

2. Kendala Kultur Demokrasi..... 94

D. Beberapa Pemikiran Ke Arah Investasi Demokrasi..... 97

1. Sekilas Tinjauan Ke Belakang..... 98

2. Masyarakat Madani dan Demokrasi..... 101

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 104

B. Penutup..... 106

Daftar Pustaka..... 107

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

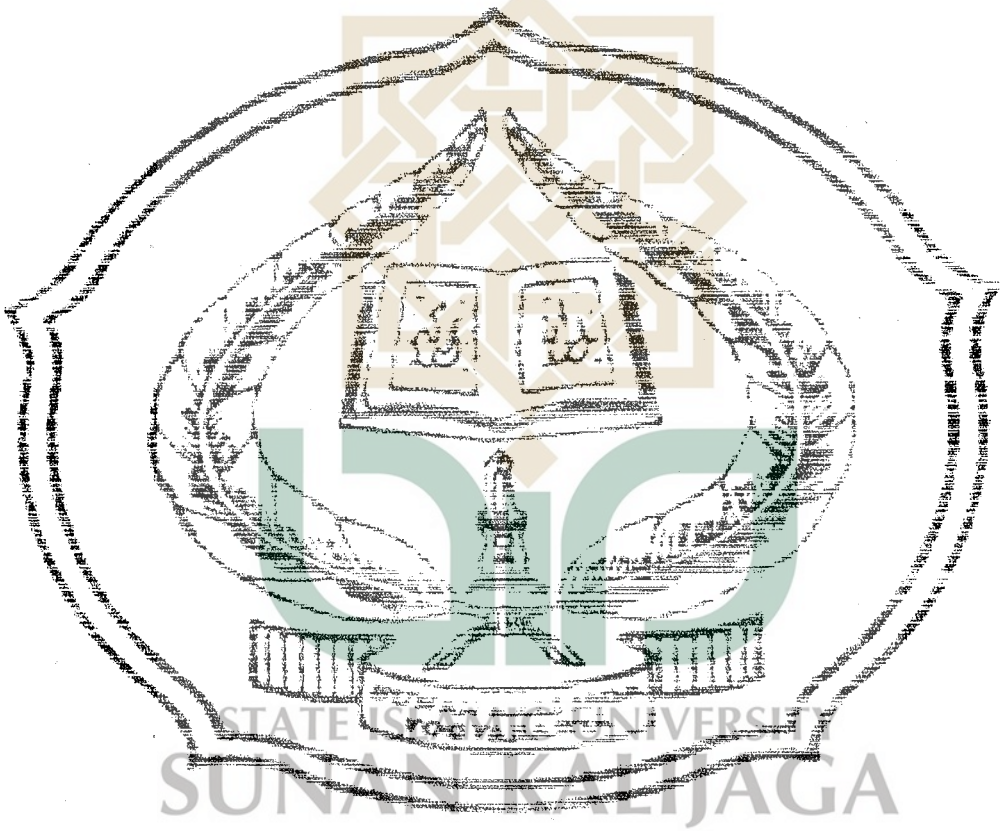

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama masa penjajahan Belanda, kondisi umat Islam sangat menyedihkan. Hanya pada periode pendudukan Jepang yang kendatipun singkat merupakan episode pembuka kembali keterlibatan umat Islam Indonesia dalam dunia politik.[1] Sumbangan terbesar Jepang bagi politik Islam Indonesia terletak pada upaya untuk menyatukan berbagai kekuatan Islam dalam suatu organisasi Masyumi yang didirikan pada Oktober 1943, yang didukung baik oleh *Muhammadiyah* maupun *Nahdatul Ulama* (NU).[2] Usaha Wahid Hasyim beserta tokoh-tokoh Islam lainnya untuk lepas dari pengaruh Jepang pada awalnya berhasil baik. Hal ini terbukti, ketika Jepang mengalami kekalahan dalam perang, sementara mereka yang terlibat dalam kepengurusan Masyumi tetap memainkan peran penting dalam politik nasional Indonesia.[3]

Pada saat-saat akhir pendudukannya, Jepang beralih orientasi dengan memberikan perhatian lebih banyak kepada kelompok nasionalis sekuler. Walaupun tetap memberikan perlindungan kepada kelompok Islam, namun mereka lebih mempersiapkan golongan nasionalis sekuler untuk memegang kendali politik nasional setelah Indonesia merdeka. Kenyataan ini terlihat dari

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[1] Lihat Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 226.

[2] Lihat Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional*, cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 127. Di dalamnya dijelaskan bahwa MIAI dirubah menjadi Majlis syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) pada bulan Oktober 1943.

[3] Pada mulanya, pembentukan Masyumi dimaksudkan untuk menggiring kekuatan Islam agar mau membantu Jepang dalam perang Asia Raya. Baca Nugroho Notosusanto, *Tentara Peta Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1979), hlm. 117-127.

wakil-wakil Islam yang duduk dalam BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tahun 1944-1945. Dalam komite inilah terjadi perdebatan ideologis yang serius antara wakil-wakil golongan nasionalis Islam dan golongan nasionalis sekuler. Perbedaan pendapat yang muncul antara dua golongan yang secara ideologis berbeda itu dalam menetapkan dasar ideologi Pancasila.

Perbedaan itu berlangsung terus. Untuk tidak menimbulkan perpecahan, karena perbedaan ideologis yang berlarut-larut itu, kompromi pun diambil; maka tercapailah kesepakatan bersama sebagaimana terumus dalam Piagam Jakarta,[4] di dalamnya disepakati bahwa Pancasila merupakan dasar Negara. Di samping itu, dicantumkan pula rumusan "ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".

Setelah kemerdekaan bangsa dicapai pada tahun 1945, sebagai imbalan politik yang proporsional, wajar jika kaum nasionalis Islam kemudian menuntut dan memperjuangkan Islam sebagai dasar Negara Indonesia yang baru merdeka. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Piagam Jakarta yang telah ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945 itu dibicarakan kembali, dengan alasan demi persatuan nasional, "tujuh kata" yang sangat berarti bagi umat Islam itu dihapus. Toleransi yang diberikan kaum Nasionalis Islam tidak di balas setimpal oleh kaum Nasionalis sekuler.

Sejak kemerdekaan diproklamasikan (17 Agustus 1945), kaum nasionalis sekulerlah yang memegang tampuk kekuasaan Negara dan berusaha menerapkan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[4] Lihat Endang Syaifuddin Anshari, *Piagam Jakarta,* (Bandung: Pustaka, 1980).

prinsip-prinsip kenegaraan modern yang sekuler dan sedikit demi sedikit menjadikan Indonesia sebagai Negara sekuler. Semenjak itu, kaum nasionalis Islam tersingkir secara sistematis dan hingga akhir 1970-an kaum nasionalis Islam berada di luar Negara. Dari sinilah, dimulainya pertentangan serius antara kaum nasionalis Islam dan kaum nasionalis sekuler. Karena kaum nasionalis sekuler mulai secara efektif memegang kekuasaan Negara, maka pertentangan ini untuk selanjutnya dapat disebut sebagai pertentangan Islam dan Negara (kekuasaan).

Al-Chaidar dalam bukunya *Reformasi Prematur*, memaparkan posisi umat Islam Indonesia sebelum Orde Baru melalui pengamatan terhadap tiga periode (masa); yaitu: Masa Revolusi Fisik (1945-1949), Masa Demokrasi Konstitusional (1950-1959), dan Masa Demokrasi Terpimpin (1957-1965).[5]

Masa Revolusi Fisik (1945-1949). Selama hampir lima tahun setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia memasuki masa-masa revolusi. Menyusul kekalahan Jepang dengan tentara-tentara sekutu, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda berusaha kembali menduduki kepulauan Nusantara. Selama periode ini, Al-Chaidar lebih lanjut menjelaskan bahwa tidak ada hambatan yang menghalangi hubungan politik antara pemimpin dan aktivitas Islam politik dengan kelompok nasionalis. Untuk menghadapi revolusi fisik dalam berhadapan dengan Belanda dan kekuatan sekutu, perdebatan-perdebatan di antara mereka mengenai corak hubungan antara Islam dan negara dihentikan sementara. Dan tidak diragukan lagi, para pendiri republik merasa bahwa mereka harus menguras seluruh energi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[5] Al-Chaidar, *Reformasi Prematur: Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total*, cet. V, (Jakarta: Darul Falah, 1998), hlm. 139.

dan kemampuan untuk mempertahankan Republik Indonesia yang baru berdiri dan mencegah Pemerintah Kolonial Hindia Belanda untuk kembali berkuasa.

Sepanjang menyangkut gagasan terbentuknya negara Islam (Islam sebagai dasar negara dan ideologi), umat Islam telah berjuang bahu-membahu meninggalkan perbedaan-perbedaan paham keagamaan antara mereka, terutama antara kalangan tradisional dan modern: sebagaimana disebutkan di awal,[6] kerja sama yang tercermin dalam BPUPKI dan PPKI, kemudian dilanjutkan dengan kongres umat Islam di Yogyakarta. Pada permukaan memperlihatkan suatu bentuk persatuan umat yang dirindukan. Namun dalam perkembangannya, baik dalam teori maupun praktek, persatuan itu tidak bertahan lama. Artinya benih-benih persatuan, yang mulai mereka rajut kembali, tidak mengesankan adanya bangunan kokoh persatuan. Perpecahan datang karena mekanisme penjatahan kedudukan atau peran politik tidak berjalan, dalam pengertian tidak memuaskan masing-masing pihak yang membentuk Fusi dalam Masyumi. Perpecahan dalam Masyumi yang diawali Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) pada tahun 1947 dan kemudian NU (1952) merupakan indikasi awal perpecahan persatuan politik internal umat Islam Indonesia. Namun demikian, adanya faktor lain yang menyebabkan, atau bahkan mempercepat munculnya perpecahan adalah karena

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[6] Dilihat dari komposisi personalia yang terlibat dalam kepengurusan Masyumi, tampak sekali bahwa partai ini melibatkan seluruh fungsionaris Islam pasca kemerdekaan. Kepengurusan dalam Majlis Syuro diketuai oleh Hasyim Asyari (wakil kalangan tradisionalis); sementara wakil-wakilnya adalah Wahid Hasyim, Agus Salim (PSII), Djamil Djambek (wakil dari golongan reformis dari Sumatra Barat) dan lain-lain. Sedangkan Pengurus Besar diketuai oleh Soekiman, Abikoesno Tjkrosoejoso, dan kemudian melibatkan M. Natsir, Muhammad Roem, dan juga Kartosuwirjo. *Ibid.*, hlm. 140.

faksionalisme tradisionalis-modernis, yang pada gilirannya membentuk watak keagamaan tertentu pada masing-masing pihak.[7]

Masa Demokrasi Konstitusional (1950-1959). Pada masa ini, Indonesia berada di bawah UUD 1950. Terlepas dari kenyataan bahwa negara telah mengalami beberapa kali perubahan konstitusi, UUD 1950 itu masih dianggap sementara. Karena itu, tugas utama Majelis Konstitusi adalah menyusun sebuah rancangan konstitusi yang permanen.

Kelompok Islam pada intinya menyatakan kembali aspirasi-aspirasi ideologi politik yang sudah mereka kemukakan pada masa pra kemerdekaan, yakni mendirikan negara yang berdasarkan Islam. Mereka mengusulkan agar Islam dijadikan ideologi negara berdasarkan argumen-argumen mengenai (1) watak holistik Islam, (2) keunggulan Islam atas semua ideologi dunia yang lain, dan (3) kenyataan bahwa Islam di peluk oleh mayoritas warga negara Indonesia.[8]

Dalam konteks Pancasila sebagai ideologi negara mengingat bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang heterogen secara keagamaan, beberapa tokoh Politisi PNI dan aktivis Kristen seperti Arnold Mononutu, Pancasila merupakan sebuah sintesis yang memadai bagi berbagai kelompok agama yang berbeda. Jika Islam harus dijadikan dasar negara, yang terutama ia khawatirkan adalah tempat kelompok-kelompok agama lain di Nusantara. Bagaimanapun hal itu mengandung citra diskriminasi konstitusional.[9]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[7] *Ibid.*, hlm. 143.

[8] Lihat B. J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia: 1945-1970,* terj. Safroedin Bahar, (Jakarta: Grafiti Pers, 1985).

[9] Al-Chaidar, *Reformasi,* hlm. 146.

Diterimanya Pancasila sebagai ideologi negara serta dihapusnya "tujuh kata" dari Piagam Jakarta dapat ditafsirkan sebagai kekalahan politik Islam. Kendatipun demikian, para pendukung gagasan negara Islam tersebut untuk sebagian besar tidak menyerah begitu saja. Gerakan Darul Islam (1949-1964) yang memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) yang dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo dan perjuangan wakil-wakil Islam di dalam sidang konstitusi hasil pemilu 1955 untuk menggolakkan kembali gerakan negara Islam, merupakan indikasi konstitusi perjuangan mereka.[10]

Masa Demokrasi Konstitusional yang diwarnai dengan jatuh bangunnya kabinet-kabinet, baik oleh alasan-alasan politik-sekuler maupun keagamaan, telah mendorong presiden Soekarno (6 Juni 1901-21 Juni 1970) untuk membubarkan konstituante. Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan dekrit itu, otomatis persoalan Piagam Jakarta terungkit kembali. Untuk itu presiden memutuskan bahwa persoalan Piagam Jakarta mempunyai hubungan kesejarahan khusus dengan UUD karenanya dianggap sebagai suatu bagian integral dari UUD itu sendiri. Pengakuan semacam itu terhadap Piagam Jakarta dapat diartikan sebagai indikasi adanya posisi khusus yang dimiliki umat Islam. Dan tampaknya umat Islam baik dikarenakan oleh problematika intern yang mereka hadapi, seperti konflik keagamaan, konsep politik tidak begitu jelas dan lain sebagainya, membuat mereka tidak begitu tanggap dalam mempergunakan kemunculan pengakuan terhadap Piagam Jakarta yang kedua kalinya itu.[11]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[10] *Ibid.*, hlm. 147.
[11] *Ibid.*, hlm. 150.

Masa Demokrasi Terpimpin (1957-1965). Sejak Soekarno memberlakukan sistem Demokrasi Terpimpin, Indonesia memasuki masa di mana peranan demokrasi telah termanipulasi oleh prinsip-prinsip kediktatoran. Soekarno diangkat menjadi Presiden seumur hidup (1962) pada masa Demokrasi Terpimpin ini. Masa ini juga ditandai oleh keberhasilan PKI (Partai Komunis Indonesia) mendekati Soekarno. Meski pernah 'digunting' tahun 1948 oleh pemberontakan komunis di Madiun, Presiden Soekarno justru memberikan keleluasaan lebih besar kepada PKI untuk bergerak dan menguasai panggung politik nasional. Hal ini mendatangkan implikasi cukup serius terhadap seluruh aspek kebijaksanaan pemerintah yang mempunyai relevansi dengan kehidupan keagamaan umat Islam. Kebijakan lain Soekarno yang dinilai sangat merugikan Islam adalah keputusan untuk membubarkan Masyumi pada bulan Agustus 1960.[12]

Data perjuangan umat Islam yang terentang di atas sesungguhnya menggambarkan pergolakan pemikiran dan perjuangan politik umat Islam. Pada periode itu, terutama periode menjelang kemerdekaan dan pada masa Demokrasi Liberal. Perhatian sebagian besar pemimpin Islam terpusatkan pada persoalan dan hubungannya dengan pembangunan politik ideologi, misalnya konsepsi bahwa Islam itu adalah *dinun wa daulah* (agama sekaligus terlibat dalam persoalan-persoalan kenegaraan); Islam itu meliputi kehidupan *dunya wa al–akhirah* (dunia dan akhirat) dan lain sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[12] *Ibid.*, hlm. 151.

Tidak satupun dari keinginan para pemimpin Islam untuk menjadikan Islam sebagai dasar dan ideologi negara terwujud. Kendatipun demikian hal ini tidak menjadikan proses ideologisasi Islam terhenti sama sekali.

Pada masa Soekarno kendatipun banyak menggariskan kebijaksanaan politik yang kurang menguntungkan perkembangan politik Islam, sebagian langkahnya cukup berarti untuk dinilai sebagai gerak islamisasi birokrasi. Gagasan-gagasannya untuk menyelenggarakan peringatan hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, Nuzulul Qur'an dan lain sebagainya, dilingkungan Istana Merdeka, serta upaya membangun masjid Istana Baiturrahim dan Masjid Istiqlal yang megah itu, merupakan kegiatan yang secara tidak langsung mengarah pada adanya proses 'ofisialisasi Islam'. Sementara pemimpin Islam berusaha keras agar gagasan tentang Islam sebagai dasar dan ideologi negara diterima, Soekarno – untuk maksud perimbangan kekuasaan – melakukan gerak ofisialisasi Islam. Karenanya dapat dikatakan bahwa perkembangan Islam pada masa Soekarno hanya menampilkan dimensi seremonialnya saja.

Yang menarik dari pola-pola pemikiran politik umat Islam pasca kemerdekaan ini adalah munculnya beberapa asumsi tentang persatuan dan perpecahan umat Islam dalam hubungannya dengan persoalan politik-pemerintahan, kekuasaan dan pemahaman keagamaan itu sendiri cenderung melupakan prinsip *Ukhuwah Islamiyah* (persatuan), cita-cita bersama dan lain sebagainya. Kenyataan ini tampak pada upaya Masyumi untuk membuat PSII dan NU merasa tidak puas dengan alokasi peran dan kekuasaan dalam struktur pemerintahan Soekarno.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pada masa Orde Baru, modernisasi telah dijadikan sebagai tema sentral pembangunan nasional. Banyak pengamat menilai bahwa munculnya gagasan modernisasi merupakan upaya pemerintah dalam mencari format politik baru yang sama sekali berbeda dengan format politik Orde Lama. Karenanya, tidaklah aneh kalau kemudian istilah modernisasi merupakan simbol legitimasi politik.

Dalam hal ini reaksi-reaksi kalangan intelektual Islam berkisar pada dua hal pokok. *Pertama*, reaksi terhadap kebijaksanaan pemerintah yang kurang memberi peluang bagi berkembangnya Politik Islam. *Kedua*, reaksi atas munculnya gagasan modernisasi yang secara langsung berhubungan dengan dasar-dasar doktrinal Islam. Kedua persoalan ini dalam perkembangannya mempunyai suatu benang merah yang saling berhubungan. Sehubungan dengan isu modernisasi itu, yang menjadi persoalan bagi umat Islam adalah bagaimana melihat "modernisasi" dari kaca mata ajaran Islam. Modernisasi beserta kebijaksanaan pembangunan nasional yang berorientasi ke program dan bersifat lebih pragmatis untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dicurigai akan menimbulkan implikasi-implikasi negatif pada diri umat Islam. Modernisasi juga menimbulkan proses sekularisasi umat dan pemahaman keagamaan mereka serta meninggalkan kesan westernisasi. Di sekitar persoalan-persoalan ini reaksi-reaksi umat Islam, terutama kalangan intelektual muncul.[13]

Keterlambatan Islam untuk berpartisipasi dalam pembangunan Orde Baru harus dibayar mahal dengan perjuangan para intelektual Islam dalam mencoba menarik kembali kaitan antara Islam dan negara. Terdapat tiga bahan pemikiran

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] *Ibid.*, hlm. 155.

yang mendorong intelektual Islam pasca Orde Baru memberikan perspektif pemikiran baru, terutama yang menyangkut persoalan umat Islam dan politik kenegaraan pada waktu itu. *Pertama*, kenyataan bahwa situasi yang tidak menyenangkan itu telah menimbulkan konflik keagamaan dan politik yang pada akhirnya telah menyudutkan posisi umat Islam yang ketika itu dianggap tidak mampu bersaing dengan kelompok minoritas dalam proses pembangunan nasional. *Kedua*, kondisi demikian tidak dapat dibiarkan. Sebagai kelompok intelektual, mereka mempunyai beban moral untuk memberikan penjelasan kepada umat tentang makna dan implikasi modernisasi dalam kerangka kepentingan Islam dan kepentingan bangsa. Untuk itu, tantangan dan kesempatan yang dimiliki umat Islam, terlebih dahulu harus dirumuskan. Dengan demikian, identifikasi persoalan umat yang dilakukan secara cermat akan sangat membantu dalam perumusan alternatif-alternatif pemecahan. *Ketiga*, para intelektual Islam berpendapat bahwa umat Islam Indonesia memiliki hak yang sama dengan siapa pun untuk ikut menyumbangkan pikiran-pikiran mereka dalam setiap proses pembangunan nasional. Pendapat demikian diperkuat dengan pengalaman empirik yang berupa kerja sama pemuda dan mahasiswa Islam dengan ABRI yang pernah terjadi ketika melawan PKI.[14]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Respons ideologis kalangan intelektual Islam Indonesia terhadap isu modernisasi yang diketengahkan oleh pemerintah Orde Baru, secara umum dapat disimpulkan bahwa para intelektual Islam justru lebih cenderung mempersoalkan terlebih dahulu apa itu modernisasi dan apa implikasinya bagi kehidupan

---

[14] Fachri Ali dan Bachtiar Effendi, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, cet. III, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 95.

keagamaan mereka.[15] Karenanya, persoalan modernisasi kemudian – untuk kepentingan legalisme dan boleh jadi juga untuk kepentingan justifikasi – selalu dirujukkan ke prinsip-prinsip ajaran Islam. Alasan konvensional untuk melihat persoalan ini biasanya adalah untuk kepentingan legalistis: apakah gagasan modernisasi bisa diterima atau tidak. Sepanjang gagasan modernisasi ini tidak berarti westernisasi, maka hal itu tidak menjadi persoalan bagi umat Islam. Justru modernisasi dalam pengertian rasionalisasi atau suatu proses untuk maju itulah yang ingin dilakukan umat Islam. Sebab dalam proses modernisasi semacam ini terdapat hubungan erat dengan konsepsi *ijtihad*. Karenanya hal demikian ini tidak saja menjadi kebutuhan masyarakat Islam, tetapi sekaligus merupakan kewajiban keagamaan yang harus dilaksanakan. Sayangnya kemudian terhadap persoalan demikian itu sebagian umat Islam hanya berhenti sampai pada *statement of intent* (pernyataan keras). Hal ini terlihat dalam kenyataan bahwa umat Islam masih berada pada posisi marjinal dalam arus proses modernisasi dan pembangunan. Akibatnya, sebagian besar pemegang kebijaksanaan kunci modernisasi berasal dari kalangan non-Islamis atau kalangan Islam dalam pengertian non-Islamis.

Selain menyoroti persoalan-persoalan modernisasi, kalangan intelektual Islam juga menyoroti persoalan tentang hubungan antara pemerintah Orde Baru dan Islam Politik (Politik Islam). Semula, kehadiran Orde Baru dianggap membawa angin segar bagi kemungkinan naiknya kekuatan Islam di panggung Politik Nasional. Harapan itu semakin memudar ketika terdapat realitas bahwa Masyumi tetap tidak mendapatkan hak hidupnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[15] Baca Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam: Peran dan Fumgsinya dalam Pembangunan diIndonesia,* (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 65-88.

Kekecewaan lain golongan Islam adalah kegagalan mereka untuk memperoleh status hukum bagi Piagam Jakarta dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 1968. Kegagalan ini pada kenyataannya telah menghancurkan mitos mayoritas angka umat Islam dalam masyarakat Indonesia. Hal ini menurut Alan Samson, merupakan indikasi bahwa partai politik Islam yang ada masih tetap belum dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pada tingkat nasional. Peristiwa itu sendiri selain menghancurkan mitos angka mayoritas, menandai belum adanya kesamaan pandangan pada diri masyarakat Islam tentang apa yang disebut sebagai aspirasi politik umat Islam dan pada akhirnya membawa suatu kenyataan bahwa golongan minoritaslah yang menguasai kepemimpinan nasional.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Skripsi ini memfokuskan kajian wacana intelektual Islam dalam pergeseran politik Indonesia, khususnya dalam merespons isu demokratisasi dengan memberi batasan tahun 1970 hingga 2000. Kaum intelektual yang dimaksudkan adalah kaum terpelajar yang acap kali menggunakan analisis secara ilmiah dalam merespons berbagai permasalahan. Dalam perkembangannya, kaum terpelajar tersebut sering disebut sebagai gerakan Islam kultural. Dalam perkembangannya, politik Indonesia mengalami pergeseran sesuai dengan zamannya masing-masing. Dalam rentang waktu 1970–2000 terdapat beberapa isu-besar, di antaranya adalah demokratisasi. Dalam hal ini demokratisasi kemudian dijadikan tema sentral dalam kajian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam periode ide atau ilmu seperti yang diungkap oleh Kuntowijoyo bahwa umat Islam sudah mulai melakukan pendekatan secara rasional dan sistematis. Kemudian diuraikan peran Islam – dalam hal ini adalah para intelektual Islam – dalam merespons isu demokratisasi. Hal ini akan terumus dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut :

a. Mengapa terjadi pergeseran politik?
b. Mengapa ideologisasi Islam gagal?
c. Bagaimana kalangan intelektual Islam merespons isu demokratisasi yang berkembang pada rentang waktu 1970 - 2000?
d. Pendekatan apa saja yang digunakan oleh kalangan intelektual Islam dalam merespons isu tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Skripsi ini menguraikan sebab-sebab terjadinya pergeseran politik Indonesia serta penjelasan tentang isu politik yang berkembang pada saat itu khususnya isu demokratisasi.

Penulis juga akan mencoba menggali kembali pemikiran kalangan intelektual Islam tentang demokratisasi serta respons terhadap isu politik tersebut, mengingat bahwa Islam adalah suatu sistem yang *terbuka*. Artinya bahwa perkembangan budaya Islam tidak hanya tumbuh dari dalam, tetapi Islam pun mengakui bahwa seluruh kemanusiaan mempunyai sumbangan kepada kebudayaan. Selain itu, Islam juga adalah kebudayaan yang orisinal dan otentik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Budaya Islam pun bersifat kosmopolitan. Artinya Islam adalah budaya yang merangkum budaya – budaya lokal, regional dan nasional.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan suatu alternatif lain dalam membangun kesadaran umat dalam menghadapi pergeseran politik, sehingga mampu merespons secara rasional dan menghasilkan rumusan pemikiran yang "jitu" dan berguna bagi nusa, bangsa, terlebih agama.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian tentang permasalahan di atas, memang bukan merupakan kajian baru. Banyak peneliti yang mengkaji tentang Islam di Indonesia, khususnya kajian tentang politik Islam. Al-Chaidar, misalnya, telah menulis kajian tentang jawaban Islam terhadap reformasi total yang terangkum dalam *Reformasi Prematur.*[16] Dalam bukunya ia menjelaskan bahwa krisis ekonomi pada pertengahan 1997 telah melahirkan gema tuntutan reformasi yang kemudian meluas ke bidang politik. Serta menimbulkan krisis multi dimensi. Dalam perspektif demikian, munculnya cendikiawan-cendikiawan kritis seperti Amien Rais, Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid telah memberi tawaran solusi atas berbagai persoalan sosial-ekonomi-politik yang memang sangat kompleks. Buku ini menurut pandangan peneliti hanya memberikan tawaran yang bersifat konseptual. Dan pertanyaan mendasar yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut adalah, mengapa umat Islam masih berada pada posisi marjinal?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[16] Al-Chaidar, *Reformasi.*

Sepanjang pengetahuan penulis, ada beberapa sarjana atau individu yang telah melakukan kajian dan penelitian tentang politik Islam serta proses demokratisasi di Indonesia.

Tim KAHMI JAYA, menerbitkan beberapa tulisan yang membahas tentang Permasalahan-permasalahan Politik di Indonesia Kontemporer. Di dalamnya terdapat tulisan H. Abdul Kahar Badjuri yang berjudul *Kendala Demokratisasi di Indonesia menyongsong Milenium Ketiga.* Usep Ranuwijaya menulis tentang *Partai Politik dan Demokrasi di Indonesi: Suatu Tinjauan Sejarah* dan tulisan Kuntowijoyo dengan judul *Strategi Baru Politik Umat Islam.*

Masih ada beberapa buku penunjang lainnya seperti, Tulisan Riza Noer Arfandi, *Demokrasi Indonesia Kontemporer*; Zainal Abidin Amir, *Peta Politik Islam Pasca Soeharto*; Arif Afandi, *Islam Demokrasi Atas Bawah: Strategi Perjuangan Umat Model Gusdur dan Amien Rais*; dan M. Syaffi Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah kajian Politik Tentang Cendikiawan Muslim Orde Baru.* Sumber-sumber tersebut di atas sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian kali ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Landasan Teori

Kuntowijoyo membagi perkembangan Islam di Indonesia menjadi tiga periode: *Zaman mitos, zaman ideologi*, periode *ide* atau *ilmu.* Periodisasi ini dibuat berdasarkan sosiologi pengetahuan yakni dengan melihat bentuk-bentuk kesadaran umat pada suatu masa. Pada zaman mitos, misalnya, umat memiliki kepercayaan mistis religius, sehingga dasar pengetahuan waktu itu menjadi mitos.

Kita ingat, dalam abad XIX sering terjadi radikalisme agraria. Mitos Ratu Adil, misalnya, merupakan cita-cita pemberontakan akibat penjajahan dan kemiskinan dalam masa tersebut. Umat waktu itu menginginkan lahirnya suatu Kerajaan *Utopia*. Tapi mereka tidak tahu bagaimana menuju ke sana dan tidak tahu persis apa yang harus dilakukan. Zaman mitos tersebut – dengan membuat bagian secara kasar – berlangsung kira-kira sampai 1900.[17]

Pada periode sesudah itu, khazanah pengetahuan Islam dipahami sebagai formulasi normatif. Dari situ ia kemudian berkembang menjadi *ideologi*, lalu menjadi *action*. Periode ini lebih lanjut disebut sebagai periode ideologi. Ia berlangsung – kira-kira – hingga 1965. tapi ini bukan batas waktu yang tegas.

Dalam zaman ideologi itu, Syarikat Islam sebagai contoh, mulai mengenal ideologi bagi persatuan kaum pedagang. Tapi zaman tersebut sebetulnya memang zaman ideologi. Pada waktu itu pula muncul komunisme. Begitu juga dengan Marhaenisme. Yang jadi kata kunci dalam zaman *ideologi* ini ialah *negara*, berbeda dengan zaman *mitos* yang mengenal kata kunci *Ratu Adil*. Setelah tercapainya kemerdekaan, demi ideologi masing-masing diusahakanlah mobilisasi massa.[18]

Pada masa selanjutnya, sesudah 1965, Partai Komunis Indonesia (PKI) tumbang. Sejak saat itu tak terasakan lagi adanya ancaman dari ideologi lain, sehingga mulai muncul benih-benih baru, di mana Islam ditampakkan sebagai ilmu, Islam – dengan formulasi normatif dari Al Qur'an dan Hadis – yang menjadi ideologi dan aksi pada masa itu, pada zaman ilmu menjadi formulasi teoritis. Ia

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[17] Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Shalahuddin Press dan Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 29.

[18] *Ibid.*, hlm. 30.

selanjutnya berkembang menjadi disiplin dan memiliki program aplikasi dan *planning*. Yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan nyata.

Jika pada zaman ideologi usaha yang terpenting ialah mobilisasi massa, dalam zaman ilmu usaha terpokok adalah memobilisasikan kesadaran masyarakat. Kuncinya pun bukan lagi *negara*, tetapi *sistem*. Dulu ada upaya mencapai negara sistem yang ideal. Sekarang ia beralih menjadi upaya mencapai sistem yang rasional. Di situ negara hanya merupakan satu aspek dari sistem. Perjuangan pun tidak hanya tergantung pada parlemen, namun bisa lebih luas. Tapi perkembangan periode ilmu ini sekarang memang belum sempurna betul.

Pada studi kali ini saya akan memfokuskan pembahasan sebagaimana judul di atas dengan melakukan pembatasan dari tahun 1970 hingga 2000. Jika melihat rumusan Kuntowijoyo di atas, batasan tahun tersebut masuk dalam periode ketiga yaitu periode ide atau ilmu.

Dalam landasan teori ini penulis menggunakan konsep strategi pergerakan dan perjuangan umat Islam Indonesia. Menurut Kuntowijoyo ada tiga strategi pergerakan dan perjuangan umat Islam antara lain, Strategi struktural, kultural dan mobilitas sosial. Di sini strategi struktural juga disebut sebagai strategi politik, karena strategi struktural menggunakan sarana politik. Kata kunci dalam strategi struktural adalah pemberdayaan (*empowerment*), artinya melalui penjelasan mengenai hak-hak warga negara, buruh, petani, pedagang dan sebagainya. Dengan demikian, dapat diharapkan ada persamaan persepsi yang melakukan aksi bersama. Dalam strategi ini akan dibentuk aliansi-aliansi antara berbagai kepentingan yang mempunyai persepsi sama. Strategi struktural untuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

memobilisasi kolektivitas, untuk kepentingan jangka pendek dengan memakai dan menggunakan metode pemberdayaan dan aliansi.[19]

Dalam strategi kultural, perbedaan yang muncul adalah Islam politik dan Islam kultural. Strategi ini mempunyai tujuan untuk mengubah cara pandang dan berpikir perorangan. Strategi ini dianggap efektif, karena pengubahan cara berpikir individu lebih tahan lama bila dibandingkan dengan pendekatan kolektif. Hal ini disebabkan karena kesadaran yang bersifat kolektif akan mudah dipengaruhi. Strategi kultural lebih menetapkan dan menitikberatkan pada individu untuk kepentingan jangka panjang, sedangkan yang dipakai adalah metode penyadaran.

Dalam strategi yang terakhir adalah mobilitas sosial yang berusaha baik secara kolektif maupun individu untuk bisa naik dalam tangga sosial yang berjangka panjang. Metode yang dipakai adalah peningkatan sumber daya manusia yang secara sadar bertujuan untuk memobilisasi masyarakat, serta tidak hanya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Dengan meminjam konsep strategi perjuangan dan pergerakan umat Islam tersebut, penulis berusaha menggunakannya dalam melihat wacana intelektual Islam dalam Pergeseran Politik Indonesia 1970-2000, khususnya dalam merespons isu demokratisasi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[19] Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid: Esai-esai Agama, Budaya dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Tradisional,* (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 112-114.

F. Metode Penelitian

Penelitian tentang sejarah merupakan sebuah kajian yang mendasarkan kepada kerangka ilmu. Artinya, sejarah tidak dapat terlepas dari metode-metode ilmiah. Dalam hal ini sejarah merupakan upaya terhadap rekonstruksi masa lalu yang terkait dengan mekanisme dan prosedur-prosedur ilmiah. Dengan demikian, untuk memperoleh sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan sebuah metode kritis terhadap peristiwa dan peninggalan masa lalu, kemudian di konstruksi secara imajinatif melalui penulisan sejarah.

Dasar utama metode sejarah adalah bagaimana merangkai bukti-bukti sejarah serta menghubungkan satu sama lain. Setelah menemukan berbagai bukti, diteliti dan menafsirkannya kembali sesuai dengan imajinasi peneliti dan tetap berdasarkan atas data-data yang ada, potongan peristiwa dan fakta sejarah sangatlah penting untuk merumuskan fakta sejarah sehingga terbentuk gambaran sejarah yang utuh dan jelas.

Kajian linguistik untuk mengamati fenomena politik sebetulnya bidang yang patut mendapat perhatian. Bukan saja bidang ini mempunyai latar belakang teoritis yang kokoh, melainkan juga hasilnya mengungkapkan hal-hal menarik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan adalah metode historis yakni proses menguji dan menganalisa secara kritis terhadap peninggalan masa lalu berdasarkan data yang telah diperoleh dan dikumpulkan. Metode historis ini bertujuan untuk merekonstruksi kejadian masa lalu secara sistematis dan obyektif. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. ***Heuristik***, yaitu tahap mencari data dari beberapa sumber seperti: buku, majalah, surat kabar dan lain-lain. Pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran melalui teknik perpustakaan. Hal ini disesuaikan dengan sifat penelitian skripsi ini, yakni penelitian literatur. Dalam hal ini, peneliti mencari beberapa tulisan yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul di atas. Dalam mencari data, penulis berusaha menghimpun baik sumber primer maupun sekunder. Kemudian penulis mengklasifikasikannya dalam sub keilmuan tersendiri, apakah karya tersebut karya sejarah atau bukan, untuk dipilih sumber yang tergolong sumber sejarah.[20]
2. ***Verifikasi***, yaitu tahap menguji keabsahan sumber. Sumber yang telah terkumpul dievaluasi baik melalui kritik ekstern maupun intern, sehingga diperoleh sumber yang keotentikan dan kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan.
3. ***Interpretasi*** atau penafsiran sejarah sering kali disebut juga dengan analisis sejarah. Analisis sendiri berarti menguraikan, dan secara terminologi berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan. Namun keduanya, analisis dan sintesis, dipandang sebagai metode-metode utama dalam interpretasi. Analisis sejarah itu sendiri bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersamaan dengan teori-teori disusunlah fakta itu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[20] Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah,* terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 35-37.

ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh.[21] Dalam penafsiran sumber ini, peneliti menggunakan pendekatan ilmu politik sebagai alat bantu dalam penelitian ini.

4. ***Historiografi***, yaitu tahap menyajikan hasil sintesa dari data yang telah diolah ke dalam bentuk penulisan atau untuk dijadikan dalam bentuk penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian yang telah dilakukan.[22]

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi disusun dalam beberapa bab. Tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab sesuai dengan keperluan kajian. Bab pertama menjelaskan Latar Belakang Masalah, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua mengungkap perkembangan Islam di Indonesia sebelum tahun 1970. Dalam pembahasan ini lebih banyak disinggung dua periode dari tiga periode yang dirumuskan oleh Kuntowijoyo, yaitu zaman mitos dan zaman ideologi.

Bab Ketiga lebih banyak menyoroti periode ide atau ilmu serta mencoba mengamati pergeseran politik yang terjadi di Indonesia dengan memfokuskan pembahasan pada pengamatan terhadap isu demokratisasi yang berkembang pada rentang waktu 1970 hingga 2000. Peneliti juga akan mencoba menggali makna demokratisasi dalam konsep Islam dan ke-Indonesiaan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[21] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research,* jilid I, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm. 3.

[22] Nugroho Notosusanto, *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah*, (Jakarta: Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata, 1964), hlm. 22-29.

Bab keempat membahas tentang wacana intelektual Islam dalam merespons isu demokratisasi.

Bab Kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dan diperbincangkan dalam keseluruhan penulisan penelitian. Bahasan ini sebagai jawaban terhadap masalah-masalah yang diajukan dalam pendahuluan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

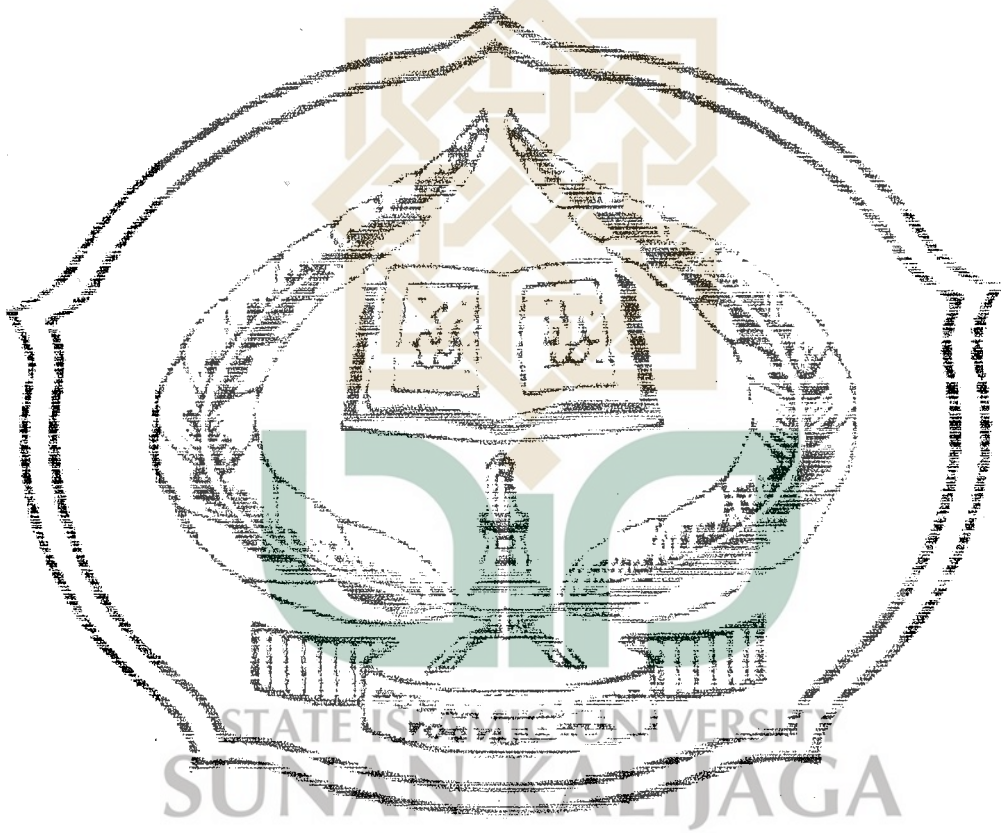

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemahaman realitas yang terbentuk secara sosial membentuk banyak aspek kehidupan lain yang penting. Bagaimana kita berpikir dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari umumnya ditentukan oleh bagaimana kita memahami realitas kita. Begitupun pergeseran politik di Indonesia sangat berkaitan dengan pemahaman realitas pada suatu masa tertentu. Bagaimana relitas dipahami pada waktu tertentu ditentukan oleh konvensi komunikasi pada waktu itu.

Pergeseran politik juga bisa terjadi karena adanya pergantian elite penguasa dengan pemahaman ideologi yang berbeda pula. Ketika Orde Lama digantikan Orde Baru, terjadi pergantian elite penguasa. Ideologi elite pun berganti. Dalam wacana politik, pergantian ini dapat kita lihat pada pergantian daftar kosakata dan pergeseran makna kata.

Deideologisasi bukanlah de-Islamisasi. Tidak ada yang mengkhawatirkan dengan deideologisasi. Sebaliknya, dalam satu dasawarsa saja telah terjadi perkembangan luar biasa di lingkungan umat. Perkembangan itu ialah: (1) munculnya Islam sebagai ilmu, dan (2) munculnya Islam inklusif.

Kebangkitan agama dan demokratisasi merupakan dua fenomena paling penting di awal abad ke- 21 ini. Di berbagai wilayah di dunia, gerakan-gerakan kebangkitan agama berjalan seiring dan terkadang memperkuat pembentukan sistem politik yang lebih demokratis. Sementara di wilayah-wilayah lain, kedua dinamika itu saling berlawanan. Di dunia Islam, isu-isu tersebut muncul ke permukaan secara istimewa, disebabkan adanya kekuatan kekuatan kebangkitan Islam dan menguatnya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tuntutan terhadap partisipasi rakyat yang lebih besar dalam proses politik pada tahun-tahun belakangan.

Respons kalangan intelektual muslim terhadap demokratisasi sudah mengarah kepada respons yang berdasarkan rasionalitas dan rumusan yang sistematis. Bahkan dewasa ini mulai muncul teori-teori yang dikembangkan dari al-Qur'an dan Hadis yang lebih banyak menonjolkan nilai hikmah (kebijaksanaan).

Pada tahun-tahun mendatang, umat akan menghadapi kenyataan baru yang memerlukan strategi baru pula. Marjinalisasi sudah selesai, karantina politik tidak ada lagi, Islamfobia sudah mundur dari pentas. Di antara kenyataan baru itu ialah semakin kentalnya keterlibatan umat dalam urusan Kebangsaan dan kenegaraan. Sumbangan Islam akan sangat menentukan wujud *civil society* (masyarakat madani) yang akan dibentuk bersama seluruh bangsa. Karenanya, perlu ada perubahan dalam cara memandang kenyataan-kenyataan yang mungkin terjadi. Perubahan itu ialah: (1) digantikannya *conspiration theory* (teori persekongkolan) dengan *factual analisis* (analisis faktual) dan (2) digantikannya *jihad psyche* (semangat jihad) dengan *falah psyche* (semangat kesejahteraan).

Secara umum wacana intelektual Islam dalam merespons isu demokratisasi di Indonesia pada rentang waktu 1970-2000, masih berkisar pada perbincangan tentang prospek demokrasi serta rumusan agenda demokrasi sebagai upaya mewujudkan masyarakat madani dan pemerintahan yang demokratis. Pada rentang waktu 1970-1990, wacana politik penguasa terasa lebih dominan. Namun, pada 1990-2000 wacana perpolitikan kaum intelektual sudah mulai mewarnai panggung politik nasional.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Dengan harapan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan pembaca pada umumnya.

Tulisan ini tentunya tidak akan selesai tanpa dukungan dan bantuan dari semua pihak. Karenanya penulis menghaturkan terima kasih. Semoga amal baik yang telah dilakukan mendapat balasan yang setimpal dari-Nya. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kahar Badjuri, "Kendala Demokrasi di Indonesia Menyongsong Milenium Ketiga", dalam Tim KAHMI JAYA, *Indonesia di Persimpangan Jalan: Reformasi dan Rekonstruksi Pemikiran dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Bandung: Mizan, 1998.

Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Al-Chaidar, *Reformasi Prematur: Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total,* Jakarta: Darul Falah, 1998.

Arif Afandi, *Islam Demokrasi Atas Bawah: Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gusdur dan Amien Rais,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Boland, B. J, *Pergumulan Islam di Indonesia: 1945-1970,* terj. Safroedin Bahar, Jakarta: Grafiti Pers, 1985.

Daliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia, 1945-1965,* cet. II, Bandung: Mizan, 2000.

Fachri Ali dan Bachtiar Effendi, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru,* cet. III, (Bandung: Mizan, 1992.Anshari, Endang Syaifuddin, *Piagam Jakarta,* Bandumg: Pustaka, 1980.

Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis,* Yogyakaarta: Titian Ilahi Press, 1997.

Foucault, Michel, *Menggugat Sejarah Ide,* terj. Inyiak Ridwan Muzir, Yogyakarta: IRCiSoD, 2002.

Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah,* terj. Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI Press, 1986.

H.A. Mukti Ali, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, Jakarta: CV Rajawali, 1987.

Jalaluddin Rahmat, "Komunikasi dan Perubahan Politik di Indonesia", dalam Tim KAHMI JAYA, *Indonesia di Persimpangan Jalan: Reformasi dan Rekonstruksi Pemikiran dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Bandung: Mizan, 1998.

Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia,* Yogyakarta: Shalahuddin Press dan Pustaka Pelajar, 1994.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

--------, *Muslim Tanpa Masjid: Esai-esai Agama, Budaya dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Tradisional,* Bandung: Mizan, 2001.

---------, "Strategi Baru Politik Umat Islam", Dalam Tim KAHMI JAYA, *Indonesia di Persimpangan Jalan: Reformasi dan Rekonstruksi Pemikiran dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*,Bandung: Mizan, 1998.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidayakarta, 1989.

Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi* (1966-1993), Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

Mun'im A. Sirry, (ed), *Islam Liberalisme Demokrasi: Membangun Sinergi Warisan Sejarah, Doktrin, dan Konteks Global,* Jakarta: Paramadina, 2002.

M. Syaffi Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 1995.

Nugroho Notosusanto, *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah*, Jakarta: Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata, 1964.

--------, *Tentara Peta Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia,* Jakarta: Gramedia, 1979.

Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan,* cet. IX, Bandung: Mizan, 1997.

---------(ed), *Khasanah Intelektual Islam,* Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

--------, *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1997.

O'DEA, Thomas F, *Sosiologi Agama: Suatu Pengenalan Awal,* terj. Tim Penerjemah Yasogama, Cet. VII, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Riza Noer Arfani, *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Soedjatmoko, *Etika Pembebasan*, Jakarta: LP3ES, 1984.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sudirman Tebba, *Islam Pasca Orde Baru,* Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional,* cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional,* cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research,* jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 1997.

Syamsul Arifin, *Merambah Jalan Baru dalam Beragama: Rekonstruksi Kearifan Perenial Agama dalam Masyarakat Madani dan Pruralitas Bangsa,* Yogyakarta: Ittaqa Press, 2000.

Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1987.

Usep Ranuwidjaja, "Partai Politik dan Demokrasi di Indonesia: Suatu Tinjauan Sejarah", Dalam Tim KAHMI JAYA, *Indonesia di Persimpangan Jalan: Reformasi dan Rekonstruksi Pemikiran dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Bandung: Mizan, 1998.

Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik Pasca Soeharto,* Jakarta LP3ES, 2003.

Zaini Muchtarom, *Islam di Jawa dalam Perspektif Santri dan Abangan,* Jakarta Salemba Diniyah, 2002.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA